

## BAB V

### KESIMPULAN

Industri migas memiliki kontribusi signifikan sebagai penghasil devisa bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun internasional suatu negara. Minyak dan gas juga merupakan komoditas penting sebagai penggerak sektor lainnya, terutama industri manufaktur, transportasi, listrik, dan sebagainya. Pada tahun 1949, Venezuela berusaha menjalin komunikasi dengan mendekati beberapa negara penghasil minyak seperti Iran, Kuwait, Arab Saudi, Gabon dan Libya, untuk berdiskusi dan memprakarsai pembentukan organisasi negara-negara pengekspor minyak dunia (OPEC).

OPEC resmi didirikan pada 14 September 1960, yaitu merupakan hasil dari sidang konferensi yang diselenggarakan pada 10-14 September 1960 di Baghdad, Iraq. OPEC merupakan organisasi sekaligus wahana bagi negara anggotanya untuk menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan konsesi minyak internasional dengan perusahaan-perusahaan minyak yang ada di seluruh dunia guna mencapai tarif yang layak untuk mengembalikan investasinya. Berdirinya organisasi negara-negara pengekspor minyak ini dipicu oleh keputusan dari perusahaan-perusahaan minyak multinasional yang memonopoli industri perminyakan dan menetapkan harga secara sepihak. Perusahaan minyak tersebut dikenal dengan nama *The Seven Sisters* yang didalamnya terdiri dari tujuh perusahaan minyak besar. Kemudian pada tahun 1962 Indonesia bergabung dengan OPEC dan menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam keanggotaan OPEC.

Sejak terlibat menjadi anggota OPEC, posisi tawar Indonesia di forum internasional semakin meningkat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang mengiringi perjalanan Indonesia di OPEC, tentu saja hal

ini akan berpengaruh terhadap keanggotaannya. Sejak tahun 2003 status *net-exporter* Indonesia resmi berubah menjadi *net-importer* minyak mentah. Akibat hal tersebut, status keanggotaan Indonesia dalam OPEC menjadi wacana perdebatan berbagai pihak di dalam negeri sehingga menuai adanya sikap pro dan kontra. Posisi Indonesia dalam OPEC dinilai sudah tidak menguntungkan lagi baik dari sudut pandang dalam negeri maupun kemampuan produksi yang kian merosot akibat tidak mampu memenuhi kuota produksi yang ditetapkan, sehingga menyebabkan tekanan yang dialami semakin besar dan memaksa pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk keluar dari keanggotaan organisasi kartel minyak terbesar di dunia tersebut.

Sejak pertengahan tahun 2014 hingga awal tahun 2016 harga minyak dunia mengalami penurunan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dan konsumsi dunia. Kondisi ini telah mendorong OPEC melakukan regulasi pemotongan kuota produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barrel per hari dari total produksinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan harga minyak dunia. Terlebih Indonesia diminta untuk memotong jumlah produksi sebesar 5% atau setara dengan 37.000 barrel per hari. Namun, Indonesia tidak menyetujui kebijakan OPEC tersebut. Hal ini dikarenakan tingkat produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan secara alami, sementara konsumsi minyak terus meningkat setiap tahunnya. Kebijakan tersebut tentunya akan merugikan dan berimbas pada penerimaan APBN sedangkan kondisi APBN di Indonesia memerlukan perbaikan guna memulihkan dan menstabilkan kondisi perekonomian dalam negeri. Dengan melihat kondisi tersebut tentunya Indonesia harus mengambil sikap karena telah terjadi perbedaan kepentingan mendasar antara Indonesia dan OPEC. Perbedaan kepentingan yang terjadi dalam konteks internasional ini tampak jelas ketika Indonesia perlu menambah produksi guna meningkatkan angka penerimaan negara, justru OPEC meminta untuk memotong produksi.

Dengan berbagai pertimbangan, dalam sidang konferensi OPEC ke-171 yang dilaksanakan di Wina, Austria pada tanggal 30 November 2016 secara sepihak Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Pemerintah Indonesia beranggapan kebijakan keluar dari keanggotaan OPEC lebih pas bagi Indonesia mengingat kondisi terkini yang sedang terjadi dan disamping itu tidak berdampak apapun terhadap Indonesia karena tidak terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang berlaku di OPEC. Kebijakan keluar dari OPEC ini merupakan yang kedua kalinya bagi Indonesia karena sebelumnya hal serupa juga pernah dilakukan yaitu pada tahun 2008.

Keluarinya Indonesia dari keanggotaan OPEC dapat membuat berbagai kalangan terbuka matanya bahwa Indonesia sudah tidak lagi seperti eranya *net-exporter*. Kedepannya, sudah pasti akan sedikit membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas jika terjadi kenaikan harga BBM ketika harga minyak internasional sedang tinggi. Dimana keputusan tersebut akan mempengaruhi terhadap ekonomi, APBN, dan produksi dalam negeri. Perlu kita sadari bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan era Presiden Jokowi ini merupakan upaya pemerintah dalam menyelamatkan APBN yang akan digunakan ke dalam sektor-sektor lainnya seperti infrastruktur, penyelamatan sosial dan sektor lainnya yang dianggap penting.